



PAPER – OPEN ACCESS

Social Survival Skill Masyarakat Rentan Bencana (Pasca Gempa Bumi Sulawesi Tengah Tahun 2018)

Author : Rahmat Muhammad dan Muhammad Taufiq Arif
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.620
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Social Survival Skill Masyarakat Rentan Bencana (Pasca Gempa Bumi Sulawesi Tengah Tahun 2018)

Social Survival Skills of Disaster Vulnerable People (Post-Central Sulawesi Earthquake in 2018)

Rahmat Muhammad^a, Muhammad Taufiq Arif^b

^aUniversitas Hasanuddin, Makassar, 90245, Indonesia

^bCivic Institute, Makassar, Indonesia

Email : rahmatmuhammad131@gmail.com, mutaqrif@gmail.com

Abstract

Indonesian territory is vulnerable to disasters, especially earthquakes. This is due to its position in the meeting of the three main plates of the world. This disaster hazard should be directly proportional to disaster preparedness. Disaster alertness is not only limited to post-disaster logistical capabilities. But also the Social Survival Skill of the community. The ability to maintain social survival in the aftermath of a disaster tends to be neglected in disaster preparedness. The vulnerability of chaotic conditions after disasters is often forgotten. So it is deemed necessary to prepare the ability to maintain the social survival of disaster prone people. The concept of Social Survival Skills. Inclusive society needs to be equipped with this capability. Post-disaster social conditions, people experience conditions of social crisis. Feelings of grief, guilt, difficulty in meeting needs, and so on. This condition makes the criminal potential increase. Joining the paralysis of law enforcement agencies is one of the factors in the aftermath of chaos.

Keywords: Community, Disaster, Social Survival Skill;

Abstrak

Wilayah Indonesia memiliki kerawanan akan bencana, khususnya gempa bumi. Hal ini dikarenakan posisinya yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia. Kerawanan bencana ini sudah seharusnya berbanding lurus dengan kesiagapan bencana. Kesiagapan bencana bukan hanya sebatas kemampuan logistik pasca bencana. Tapi juga Social Survival Skill masyarakat. Kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup sosial pasca bencana cenderung diabaikan dalam kesiagapan bencana. Kerentanan terjadinya kondisi chaos pasca bencana sering terlupakan. Sehingga dianggap perlu mempersiapkan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup sosial masyarakat rentan bencana. Konsep Social Survival Skill. Masyarakat secara inklusif perlu dibekali kemampuan ini. Kondisi sosial pasca bencana, masyarakat mengalami kondisi krisis sosial. Perasaan duka, rasa bersalah, sulitnya memenuhi kebutuhan, dan sebagainya. Kondisi ini membuat potensi kriminal meningkat. Ikut lumpuhnya lembaga penegak hukum menjadi salah satu faktor terjadinya chaos pasca bencana.

Kata Kunci: Bencana, Masyarakat, Social Survival Skill

1. Pendahuluan

Bencana pada dasarnya terjadi karena adanya fenomena alam ataupun fenomena sosial yang mengganggu kelangsungan hidup suatu masyarakat. Hal ini membuat tatanan sosial masyarakat menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan itu dikarenakan berubahnya kondisi dari masyarakat berswasembada menjadi masyarakat rentan. Suatu kondisi sebelum bencana dimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, berubah menjadi masyarakat yang rentan atau kemampuan memenuhi kebutuhannya menjadi lumpuh dikarenakan bencana. Selain lumpuhnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat juga menghadapi keadaan duka baik dikarenakan luka fisik hingga kehilangan anggota keluarga atau kerabatnya. Hal ini mengakibatkan kekacauan sosial (*social disorder*) dalam masyarakat.

Gempa bumi berkekuatan 7,4 Magnitudo mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2018, tepatnya di Kota Palu dan Kabupaten Doga. Bencana alam ini semakin parah karena terjadi pencairan atau likuefaksi dan tsunami. Akibatnya, ribuan orang tewas, puluhan ribu rumah hancur dan ratusan ribu jiwa mengungsi. Bencana ini memporak-porandakan tatanan masyarakat seketika. Masyarakat yang awalnya pada kondisi normal, secara tiba-tiba dihadapkan dengan keadaan krisis. Masyarakat bukan hanya dihadapkan oleh keadaan yang serba sulit. Namun juga dihantui perasaan trauma dan duka.

Kondisi seperti ini menimbulkan kerawanan sosial pada masyarakat. Sarana umum yang lumpuh seperti akses jalan, listrik, air dan jaringan telepon membuat proses pemenuhan kebutuhan menjadi sulit. Pemerintah masing-masing negara telah mengambil langkah-langkah taktis dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Di Indonesia ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki badan koordinasi di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana. Badan ini berfungsi untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana seperti penanganan pengungsi, melakukan evakuasi korban, distribusi logistik. BNPB memiliki peran kerja yang terencana, terpadu dan menyeluruh, hingga penetapan situasi dikatakan aman.

Secara umum, praktek mitigasi dapat dikelompokkan ke dalam mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik, sementara mitigasi non struktural antara lain meliputi perencanaan tata guna lahan, memberlakukan peraturan pembangunan, dan melalui pendidikan untuk menyiapkan masyarakat membiasakan diri hidup bersama dengan bencana, khususnya untuk lingkungan yang sudah terlanjur terbangun, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam hidupnya.

Seperti yang kita ketahui pula bahwa penanggulangan bencana bukanlah melulu persoalan logistik. Bahkan dalam situasi pasca bencana, sesungguhnya masyarakat masih bisa bertahan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dia miliki sampai bantuan datang. Bencana alam gempa bumi disusul Tsunami yang terjadi dipenghujung tahun 2018 di wilayah Palu-Donggala Sulawesi tengah, dapat dijadikan pelajaran dalam menghadapi bencana selanjutnya yang tidak diketahui kapan dan dimana.

Tulisan ini menyorotkan pada kehidupan sosial pasca bencana di Palu. Beberapa media cetak maupun elektronik beramai-ramai mengabarkan bencana dahsyat di bagian Tengah Indonesia ini. Namun dari beberpa pemberitaan, ada kabar yang kurang mengesankan. Terjadi chaos berupa penjarahan di beberapa tempat perbelanjaan. Penjarahan mulai dari barang elektronik hingga pada mesin ATM. Pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan khusus penanggulangan bencana. yaitu, masyarakat bisa memanfaatkan logistik dari toko makanan dan perobatan yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah. namun kondisi chaos tidak ter elakkan. Mobil bantuan logistik dijarah dijalan, pusat perbelanjaan diserbu dan ATM di bobol.

Kondisi seperti ini dikarenakan krisis sosial yang tidak mampu dihadapi oleh masyarakat. Sehingga tindakan kriminal terjadi. Kondisi itu diperparah karena fasilitas hukum ikut lumpuh.

2. Kajian Literatur

WHO menyebutkan bencana sebagai suatu kejadian yang mengganggu kondisi normal dan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat yang berdampak (*an occurrence disrupting the normal conditions of existence and causing a level of suffering that exceeds the capacity of adjustment of the affected community*).^[1]

Kegiatan Pencegahan bencana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Hal itu diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6). Pencegahan merupakan suatu upaya preventif dalam mengelola ancaman dan kerentanan dari risiko bencana yang tertuang dalam program-program di masyarakat di tingkat local maupun daerah di tingkat kabupaten untuk menghilangkan secara total ancaman dan kerentanan penyebab risiko bencana.

Upaya mengurangi resiko bencana, dikenal istilah mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya mengurangi resiko dari dampak bencana, baik melalui perencanaan konstruksi, maupun penyuluhan guna melakukan penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Hal ini diatur pemerintah dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 9. Kegiatan mitigasi bertujuan untuk meminimalisasi dampak ancaman dalam tahapannya kegiatan mitigasi dilakukan ketika kita telah melakukan identifikasi ancaman dengan program-program yang di prioritaskan untuk mengelola ancaman.

Soetomo (2013) berpendapat bahwa kewenangan masyarakat untuk melakukan upaya penanganan masalah sosial tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas guna melakukannya. Dari pengamatan melalui praktik kehidupan dalam keseharian ternyata masyarakat telah banyak melakukan upaya penanganan masalah sosial ini. Berbagai pola penanganan mereka peroleh melalui proses belajar sosial yang berlangsung dalam dinamika interaksi dan relasi sosialnya.^[2]

Kemampuan mempertahankan kehidupan sosial untuk bencana sangat penting dalam masyarakat. Kemampuan ini ditujukan agar masyarakat dapat tetap mengatur kehidupannya meskipun dalam kondisi krisis setelah bencana. Pembangunan sosial kita tidak bisa melepaskan aspek modal sosial, yaitu kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan pada kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, demikian juga kelompok-kelompok masyarakat yang paling besar, negara, dan seluruh kelompok lain yang ada di antaranya.^[3]

Menurut Ahyudin (2005) salah satu syarat sukses penanganan emergency bencana adalah kepemimpinan. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan adalah kebingungan, kehancuran, kerugian, dan malapetaka. Kepemimpinan yang dimaksud tentu selayaknya dari unsur pemilik otoritas (pemerintah). Keberhasilan semua elemen masyarakat dalam kancah bencana sangat tergantung keberadaan pemimpin. Kepemimpinan dalam penanganan emergency bencana haruslah mampu dengan cepat, tepat, dan berani mengambil keputusan, bersikap tegas, menjalankan sistem instruksi bukan diskusi.^[4]

Guna memperoleh efektifitas dan optimalisasi sumberdaya diperlukan persyaratan tertentu antara lain; (1) Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan; (2) Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat krisis; (3) Kerja sama dan kemitraan antara berbagai pihak; (4) Koordinasi yang harmonis. Keempat syarat tersebut dipadukan untuk menyusun; Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penanggulangan Bencana. Koordinasi memerlukan; (1) Manajemen penanggulangan masalah bencana yang baik; (2) Adanya tujuan, peran dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi; (3) Sumber daya dan waktu yang akan membuat koordinasi berjalan; (4) Jalannya koordinasi berdasarkan adanya pertukaran informasi dari berbagai sumber informasi yang berbeda. ^[5]

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian evaluasi (*Evaluation Research*). Alkin mengungkapkan metode penelitian evaluasi sebagai proses menegaskan keputusan, memilah informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisa informasi sehingga dapat dibuat laporan data yang dapat digunakan oleh pembuat keputusan dan beberapa alternatif yang dapat dipilih^[6]. Metode evaluasi ini menggunakan sistem *assesment*, yaitu memberikan informasi mengenai suatu keadaan atau kondisi tertentu.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Krisis sosial adalah suatu keadaan yang tidak kondusif yang terjadi di tengah masyarakat, dimana membuat kondisi lingkungan sosial yang tidak aman. Krisis sosial pada masyarakat terdampak bencana sangat rentan terjadi. Kebutuhan yang mendesak dan lumpuhnya lembaga kontrol sosial menjadi faktor utama terjadinya chaos. Sehingga diperlukan formula agar krisis sosial dalam masyarakat dapat ditanggulangi.

Penanggulangan krisis sosial masyarakat dapat dibangun dengan memberikan kemampuan masyarakat untuk dapat mempertahankan tatanan sosialnya di kondisi ekstrim sekalipun. Kemampuan ini akan membuat masyarakat bisa mengatur kehidupan sosialnya di kondisi yang serba kekurangan.

4.1. Keadaan Pasca Gempa

Seperti dijelaskan sebelumnya, bencana gempa bukanlah satu-satunya yang menyebabkan Kota Palu dan Kabupaten Donggala menjadi porak-poranda. Adanya likufaksi dan *tsunami* memperparah kerusakan materi maupun korban jiwa. Dampak dari bencana ini dibagi atas 3 aspek, yaitu dampak aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan aspek sosial.

4.1.1. Aspek Kesehatan

Tabel 1. Jumlah Korban Jiwa Bencana Sulawesi Tengah 28 September 2018

Korban	Jumlah (Jiwa)
Meninggal	2.096
Hilang	1.373
Luka Berat/Rawat Inap	4.438
Luka Ringan/Rawat Jalan	88.122

(sumber: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2018)

Selain korban jiwa diatas, dampak kesehatan lain yang timbul adalah penyakit. Penyakit yang timbul seperti ISPA, diare akut, penyakit kulit, hipertensi, *influenza like illness* dan penyakit lainnya.

4.1.2. Aspek Infrastruktur

Selain dampak kesehatan yaitu korban jiwa, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami juga memberikan dampak kerusakan pada infrastruktur bangunan umum maupun rumah huni. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyebutkan sebanyak 66.926 unit rumah rusak. Rusak yang dimaksud termasuk dalam kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Selain itu, sebanyak 2.736 sarana pendidikan rusak. 74 unit fasilitas sehatan ikut rusak. Sarana listrik tidak luput dalam bencana ini, sebanyak 7 gardu PLN ikut rusak yang mengakibatkan hampir seminggu Kota Palu dan Kabupaten Donggala tanpa listrik. Karena tidak adanya pasokan listrik, sarana komunikasi ikut lumpuh.

Jalan penghubung juga mengalami kerusakan parah, sehingga berakibat pada lambannya distribusi logistik. Pelabuhan dan bandara udara juga terdampak dalam bencana ini. *Crane* peti kemas di Pelabuhan Pantoloan roboh. Menara navigasi di Bandara Mutiara Sis Al Jufri ambruk dan *runaway* bandara retak, sehingga tidak memungkinkan digunakan oleh pesawat besar. Jembatan Ponulele yang melintang di teluk talise dan menjadi ikon Kota Palu ikut ambruk setelah diterjang *tsunami*.

4.1.3. Aspek Sosial

Kerugian dalam aspek sosial pasca gempa melanda meliputi hilangnya mata pencaharian, pengangguran dan meningkatnya tingkat kriminalitas. Matinya beberapa sarana umum membuat kekacauan dan krisis semakin parah. Listrik padam, logistik tersendat, bahan bakar langka, komunikasi terputus dan ketidakpercayaan masyarakat akan kemampuan pemerintah daerah dalam menanggungi bencana.

4.2. Kekacauan Pasca Bencana

Setelah bencana redah, datanglah krisis. Kondisi masyarakat yang awalnya normal, secara tiba-tiba diperhadapkan dengan kondisi krisis. Hal seperti ini menjadikan kondisi masyarakat menjadi rentan disorganisasi. Media cetak maupun elektronik mulai mengabarkan kekacauan di sejumlah titik wilayah terdampak. Salah satunya, penjarahan. Masyarakat yang terdesak untuk memenuhi kebutuhannya mulai kebingungan. Kondisi krisislah mendorong kepanikan warga untuk bertahan hidup. Akibatnya di beberapa pusat perbelanjaan di serbu dan melakukan penjarahan. Kemudian semakin parah ketika izin pemerintah untuk mengambil barang dagangan, disalah artikan sehingga memicu gerakan massa yang tak terkendali di tempat-tempat perbelanjaan.



Gambar 1. Seorang pria mengangkut televisi dari pusat perbelanjaan di kota Palu, 30 September 2018

Sumber: *bbc.com*, 2018

Persoalannya, barang-barang yang diambil bukan hanya keperluan bertahan hidup. Namun, barang-barang yang termasuk dalam kebutuhan sekunder dan tersier. Bukan hanya itu, di beberapa titik di Kota Palu dikabarkan telah terjadi pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kondisi ini diperparah karena lembaga kontrol sosial seperti polisi ikut berdampak dalam bencana.

4.3. Social Survival Skill

Belajar dari kondisi krisis yang terjadi pasca bencana di Sulawesi Tengah, sudah sepatutnya membuat suatu konsep mitigasi sosial. Mitigasi seperti pengertiannya yaitu upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi sosial yaitu upaya untuk mengurangi resiko bencana dalam aspek sosial. Mitigasi sosial ini dalam bentuk pengembangan kemampuan bertahan masyarakat dalam menghadapi bencana menghadapi hantaman krisis sosial. Kemampuan bertahan ini disebut dengan *Social Survival Skill* meliputi, kemampuan reorganisasi masyarakat pasca bencana, pengendalian sosial pasca bencana dan *self-rehabilitation*.

Reorganisasi masyarakat merupakan usaha untuk menghimpun kembali struktur dalam masyarakat pasca bencana. Kemampuan reorganisasi ini dibentuk sebagai agenda mitigasi, agar masyarakat bisa melakukan reorganisasi untuk menunjang kebutuhan yang fundamental. Bencana alam bisa saja mengacaukan struktur dalam masyarakat dikarenakan kepanikan untuk segera memenuhi kebutuhannya, perasaan duka atas kehilangan anggota keluarga ataupun rasa kecewa atas penanganan bencana yang lambat. Dengan melakukan reorganisasi, masyarakat menjadi terintegrasi dan mampu membentuk koloni-koloni guna mencapai kebutuhan bertahan hidupnya.

Pengendalian Sosial Pasca Bencana ialah upaya untuk tetap menjaga kondusifitas. Seperti diketahui bahwa lembaga kontrol sosial seperti polisi dan TNI, sering tidak luput dari dampak bencana. Sehingga, perlu ada *backup* jika terjadi bencana. Yaitu, dari masyarakat itu sendiri. Sehingga aksi kriminal saat bencana terjadi dapat terminimalisir. Sehingga dikondisi krisis masyarakat tetap merasa aman. Dan kejadian jahar menjarah bisa terhindari

Social Survival Skill dapat dibangun melalui lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga agama. Lembaga sosial kemasyarakatan dapat berupa lembaga masyarakat setempat seperti RT, RW atau Dusun. Dalam menghadapi krisis sosial pasca bencana, perlu pelebagaan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Kekacauan sosial terjadi dikarenakan pelebagaan dalam masyarakat tidak difungsikan. Disaat kontrol sosial masyarakat lumpuh, maka lembaga sosial masyarakat seharusnya hadir untuk mengatur hal menjadi penyokong. Pelebagaan pasca bencana ini seharusnya terbangun sendiri. Dimana tokoh masyarakat berperan penuh untuk mengatur tatanan sosial hingga kondisi kembali normal. Pengaturan sumber daya yang tersedia sembari menunggu bantuan dari luar perlu di organisir. Sehingga terbentuk Kelompok-kelompok masyarakat kecil untuk bersama-sama dapat memenuhi kebutuhannya. Masyarakat perlu diberikan kemampuan merehabilitasi dirinya sendiri (*Self-Rehability*).

5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan terbesar dalam menghadapi bencana berada pada masyarakat itu sendiri. Mengandalkan pemerintah sebagai kekuatan tunggal adalah jalan yang keliru. Kemampuan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi pasca bencana tentunya sangat terbatas. Belum lagi masalah akses dan ketersediaan logistik. Sehingga masyarakat perlu membekali dirinya dengan kemampuan merehabilitasi dirinya. Kehidupan sosial pasca bencana perlu di bekali dengan social survial skill untuk mencegah krisis sosial dalam masyarakat terdampak bencana. Tentunya kajian tentang kemampuan masyarakat merehabilitasi dirinya sendiri tidak berhenti padatulisan ini. Diperlukan penelitian mendalam dan lebih komprehensif mengenai masalah *society post-disaster rehablity*.

Referensi

- [1] WHO, *Disaster & Emergencies Definition*. Adis Ababa: Panafrican Emergency Training Centre, 2002.
- [2] Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- [3] Fukuyama, F, *Trust. Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam, 2007.
- [4] Dwiatno,A, Triadmadja, R., & Darmanto, *Kajian Focus Group Discussion (FGD) dalam Mitigasi Bencana Tsunami di Desa Poncosari*. " Forum Teknik Sipil, 18, pp. 859-868, 2008
- [5] Lestari, P., Prabowo, A., & Wibawa, A, " Manajemen komunikasi bencana Merapi 2010 pada saat tanggap darurat " *Jurnal Ilmu Komunikasi 10*, pp. 173-197, 2012.
- [6] Tayipnapi, F.Y, " *Evaluasi Program* " Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan., 1989.